

ANALISIS KEBUTUHAN PELAYANAN SOSIAL KORBAN BENCANA ALAM

(Need Assessment of Social Services for Disaster Victims)

SURADI

Abstract Disaster is the natural event that could not be detected from geological condition, topography and Indonesian geographical condition. As a result, disaster is a kind of normal event, it is not strange. However, whenever the disaster comes, problems that have always been found such as weakness of coordination, evacuation obstacles, lateness of assistance and limit of facilities. Thus, social service management for the victim disaster has to be upgraded, so the focus and main objective of social service could be optimally achieved.

Key Words: disaster, social service, coordination

1. PENDAHULUAN

Bencana alam yang terjadi di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari kondisi Indonesia. Dimana Indonesia terletak di daerah yang tepat di tengah-tengah interaksi dari tiga besar lempeng tektonik, yaitu di sebelah selatan lempeng Indo-Australia, sebelah Timur Laut Lempeng Pasific, dan sebelah Barat Daya Lempeng Eurasia. Interaksi dari lempeng-lempeng tersebut akan mengakibatkan terjadinya gempa bumi di permukaan. Kondisi ini masih ditambah dengan gunung api yang jumlahnya sekitar 500, dan 128 di antaranya masih aktif.

Sebagian dari bencana alam ini pada batas-batas tertentu terjadinya dapat diprakirakan, seperti: letusan gunungapi dan banjir. Sedangkan sejumlah bencana alam lainnya sangat sulit untuk diprakirakan terjadinya, seperti: gelombang pasang (tsunami), gempa bumi, tanah longsor, kekeringan, dan kebakaran hutan. Kedua karakter bencana tersebut memiliki skala mulai

dari lemah sampai sangat kuat yang mengakibatkan kerugian yang sangat besar.

Masih sangat jelas dalam ingatan kita terjadinya bencana alam gempa dan tsunami di Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) dan Nias - Sumatera Utara yang merupakan peristiwa luar biasa pada akhir tahun 2004. Peristiwa yang memiliki siklus setiap 100 - 200 tahun ini terjadi dalam skala yang sangat besar, sehingga memporak porandakan sebagian besar wilayah NAD. Pemerintah kewalahan menghadapi akibat bencana alam ini, karena pada waktu yang sama sedang konsentrasi pada pemulihan ekonomi nasional. Berbagai kritik diarahkan kepada pemerintah, antara lain lemahnya koordinasi di lapangan yang menyebabkan penanganan korban tersendat-sendat. Terlepas dari kelemahan tersebut, pemerintah tetap memiliki komitmen yang besar untuk membangun kembali NAD. Hal ini dibuktikan dengan dialokasikannya dana sebesar 914 milyar untuk membangun kembali propinsi

yang porak poranda tersebut (*Media Indonesia*, 27 Jan. 2005).

Dana yang dialokasikan pemerintah ini sudah diperhitungkan memadai dalam upaya pemulihan NAD yang antara lain untuk membangun rumah, jembatan, sekolah, jalan dan fasilitas umum lainnya. Namun demikian, dampak gempa tsunami di NAD bukan saja menyebabkan kehancuran bangunan fisik. Kehancuran psiko-sosial masyarakat sebenarnya lebih parah lagi apabila dibandingkan dengan kehancuran bangunan fisik tersebut. Tidak sedikit korban yang mengalami stress, putus harapan, hysteria, depresi dan bahkan mengalami gangguan jiwa. Membangun kembali situasi psiko-sosial masyarakat ini memerlukan waktu yang sangat lama, dan biaya yang tidak sedikit. Kondisi ini masih ditambah lagi dengan persoalan nilai dan akar budaya NAD yang khas, yang memerlukan pertimbangan dari sisi agama Islam yang menjadi dasar kehidupan masyarakat NAD.

Peristiwa bencana alam tsunami dan gempa yang terjadi di NAD, Nias, Alor dan Nabire serta berbagai tempat lain di beberapa wilayah Indonesia, sudah cukup memberikan pelajaran untuk mengembangkan metode dan strategi penanganan korban bencana alam. Peristiwa tersebut, memberikan pelajaran betapa kompleksnya dampak yang ditimbulkan oleh bencana alam. Yang implikasinya pada pola penanganan dan pelayanan yang perlu disediakan. Sehubungan dengan itu, permasalahan bencana alam ini perlu dipertimbangkan agar bisa masuk ke dalam agenda utama kebijakan dan strategi pembangunan sosial atau *Disaster - in - Social Development* (DISD). Konsekuensi dari pemikiran ini, bahwa

setiap kebijakan dan program pembangunan, baik yang dilakukan pemerintah maupun swasta, perlu mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh dampak dan bencana yang mungkin terjadi.

2. JENIS-JENIS BENCANA ALAM

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, manusia, dan atau oleh keduanya yang mengakibatkan korban manusia, penderitaan, kerugian harta benda, kerusakan sarana dan prasarana lingkungan dan ekosistemnya serta menimbulkan gangguan terhadap tata kehidupan dan penghidupan masyarakat (Dit BS-KBA, 2004). Dari pengertian tersebut, dapat dikenali bahwa penyebab terjadinya bencana alam adalah karena gejala alam dan akibat dari ulah manusia.

a. Gejala alam

Jenis-jenis bencana alam yang terjadi disebabkan oleh gejala alam seperti : gunung meletus, gempa bumi, banjir, kekeringan, erosi, dan tanah longsor.

b. Ulah manusia

Jenis-jenis bencana alam yang terjadi disebabkan oleh ulah manusia seperti: banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, pengerukan areal rawa-rawa dan pembangunan yang tidak mempertimbangkan keseimbangan kelestarian alam.

Kemudian data tentang jenis bencana, dan frekuensi kejadian bencana yang terjadi di seluruh wilayah Indonesia per Januari sampai dengan Agustus 2005 (Dit. BS-KBA, 2005) dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1: Rekapitulasi Data Kejadian Bencana Alam Periode Bulan Januari S/D Agustus 2005

NO	PROVINSI	JENIS BENCANA							AKIBAT BENCANA					RUMAH PENDUDUK RT/RB		
		BANJIR	LONGSOR	ANGIN TOPAN	ANGIN PUTTING BELIUNG	GEMPA BUMI	GUNJUNG API	ABRASI PANTAI	KEKE-RINGAN	TSUNAMI (GELB PANGANG)	JUMLAH FRE	KORBAN MANUSIA			RUMAH RINGAN	
												MID/ HILANG	Kepala Keluarga		Menderita	Jawa
01	NANGGROE ACEH DARUSALAM	2	-	-	1	1	-	-	-	3	103	10,802	43,303	7,529	7,510	
02	SUMATERA UTARA	-	-	-	1	1	-	-	-	2	682	6,279	25,410	239	39,895	
03	SUMATERA BARAT	6	3	-	3	5	-	-	-	17	2	5	34,587	53	73	
04	RIAU	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
05	JAMBI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
06	SUMATERA SELATAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
07	BENGKULU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
08	KEP. BANGKA BELITUNG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
09	LAMPUNG	10	-	-	-	-	-	-	-	10	-	14,138	57,578	-	-	
10	BANTEN	1	1	-	-	-	1	-	-	3	-	-	-	72	17	
11	DKI JAKARTA	3	4	1	1	-	-	-	-	4	514	4,907	19,006	4,616	4,614	
12	JAWA BARAT	8	25	14	-	3	-	-	-	47	4	73	290	670	143	
13	JAWA TENGAH	8	25	14	-	-	-	-	-	47	4	73	290	670	143	
14	DI YOGYAKARTA	21	3	9	-	-	-	-	-	37	38	1,808	2,401	362	606	
15	JAWA TIMUR	21	3	9	-	-	-	-	-	37	38	1,808	2,401	362	606	
16	BALI	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
17	KALIMANTAN TIMUR	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,421	8,821	-	-	
18	KALIMANTAN BARAT	4	-	-	-	-	-	-	-	4	-	5,211	16,939	-	-	
19	KALIMANTAN TENGAH	9	-	-	-	-	-	-	-	9	-	265	941	-	-	
20	KALIMANTAN SELATAN	6	-	-	-	-	-	-	-	6	-	315	41,793	10,920	-	
21	SULAWESI UTARA	2	2	3	-	-	-	-	-	7	1	315	1,050	10,920	105	
22	SULAWESI TENGAH	-	-	-	-	-	-	-	-	1	29	29	145	1,003	312	
23	SULAWESI TENGGARA	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
24	SULAWESI SELATAN	2	1	3	-	-	-	-	-	6	1	6,545	26,488	32	105	
25	GORONTALO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
26	NUSA TENGGARA BARAT	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	14	60	-	8	
27	NUSA TENGGARA TIMUR	-	-	-	-	3	-	-	-	6	-	24,620	455,521	102	38	
28	MALUKU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
29	MALUKU UTARA	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
30	PAPUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
31	IRIAN JAYA BARAT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
JUMLAH		79	39	31	3	14	8	2	3	179	1,374	77,747	734,333	36,518	53,426	

Sumber : Direktorat Bantuan Sosial Korban Bencana Alam, 2005

Dari 179 kejadian bencana alam, menimbulkan korban manusia yang dinyatakan hilang dan atau meninggal dunia sebanyak 1.374 jiwa, serta mengalami penderitaan sebanyak 734.333 jiwa atau 77.747 KK. Selain itu bencana tersebut menimbulkan kerusakan pada harta milik penduduk, yaitu rumah rusak ringan sebanyak 36.518 unit dan rumah rusak berat/ rusak total sebanyak 53.426 unit.

3. DAMPAK BENCANA ALAM

Berbagai dampak langsung terjadinya bencana alam terhadap kondisi kehidupan masyarakat (Nugroho, 1984; *Tempo, Kompas, Media Indonesia 27 Des. - 27 Jan. 2005*), yaitu :

- a. Ekonomis
Bencana alam mengakibatkan kerugian materi bagi masyarakat. Harta milik masyarakat seperti rumah, hasil bumi, hewan ternak dan jenis harta milik lainnya rusak atau hilang disebabkan oleh bencana alam ini. Sumber penghidupan mereka seperti sawah, ladang, tambak, perkebunan dan sebagainya juga mengalami kerusakan atau hilang. Bahkan cadangan pangan masyarakat tidak dapat diselamatkan. Hilangnya sumber penghidupan ini berarti ancaman kelangsungan hidup masyarakat.
- b. Kecacatan
Bencana alam tidak hanya merusak atau menghilangkan unsur ekonomis, tetapi tidak sedikit masyarakat yang mengalami cacat fisik. Tanah longsor yang diikuti dengan batu-batuan, rumah roboh, pohon tumbang dan sebagainya mengakibatkan sebagian korban bencana alam mengalami kecatatan, baik yang sifatnya sementara maupun menetap atau seumur hidup.
- c. Kesehatan
Berbagai jenis penyakit mewabah dengan terjadinya bencana alam, seperti diare, deman berdarah, tipus, paru-paru dan sebagainya. Wabah penyakit tersebut mengancam kesehatan para korban, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang; dan bahkan di antara para korban tidak dapat diselamatkan jiwanya.
- d. Mobilitas
Bencana alam mengakibatkan berbagai sarana dan prasana, seperti jalan, jembatan dan alat transportasi lainnya menjadi rusak parah. Kondisi ini menyebabkan terganggunya mobilitas masyarakat dalam upaya memenuhi kebutuhannya.
- e. Sosial-psikologis
Kondisi tersebut di atas (point 1-4), menyebabkan terjadinya goncangan jiwa para korban bencana alam. Kehilangan harta milik, anggota keluarga, sumber penghidupan dan mata pencaharian, kecacatan, wabah penyakit dan hambatan mobilitas sosial, merupakan sejumlah kondisi yang dapat menyebabkan terjadinya stress. Bahkan kondisi ini akan menyebabkan terjadinya depresi mental (*post-traumatic stress disorder*) yang akan berlangsung lama. Apabila depresi mental ini berlarut-larut, maka pada sebagian orang dapat menimbulkan gangguan jiwa akut (gila). Sedangkan pada sebagian yang lain akan menimbulkan perilaku

agresif-impulsif dan anarkis. Mereka melakukan penjarahan dan perampokan karena merasa terabaikan untuk sekadar bertahan hidup.

f. Kemiskinan dan Ketelantaran

Akibat terjadinya bencana alam sebagaimana digambarkan pada butir-butir di atas, yaitu terjadinya kemiskinan dan ketelantaran dalam waktu yang sangat cepat. Jumlah penduduk miskin dan telantar dalam waktu yang sangat singkat meningkat dua atau tiga kali lipat dari sebelumnya.

g. Trafiking

Pelajaran dari bencana tsunami dan gempa di NAD dan Sumatera Utara, yaitu adanya isu perdagangan anak dan wanita (*trafiking*). Dalam situasi carut marut, tidak tertutup kemungkinan ada saja segelintir orang yang memanfaatkan kesempatan memperjual belikan anak dan wanita korban bencana alam. Meskipun sampai saat ini belum terbukti, tetapi *trafiking* di Indonesia sudah disinyalir merupakan sindikat antar negara. Oleh karena itu, pemerintah perlu mengambil langkah-langkah antisipasi secara serius.

4. KEBUTUHAN PELAYANAN SOSIAL KORBAN BENCANA

Sebelum menentukan jenis pelayanan, terlebih dahulu perlu dipetakan siapa saja korban bencana alam (*victim analysis*). Korban bencana alam pada dasarnya dapat dikategorikan berdasarkan kelompok umur dan jenis

kelamin, pekerjaan, etnis dan agama serta permasalahannya.

a. Umur dan Jenis Kelamin

Usia korban bencana alam dapat dikelompokkan, yaitu : balita, anak-anak, remaja, dewasa dan lanjut usia, baik laki-laki maupun perempuan.

b. Mata Pencaharian Hidup

Jenis pekerjaan atau mata pencaharian korban bencana alam dapat dikelompokkan, yaitu : petani, nelayan, pedagang, PNS, pertukangan, peternakan dan lain-lain.

c. Etnis dan Agama

Korban bencana alam dapat dikelompokkan berdasarkan etnis dan agama yang dianut. Kategori etnis dan agama ini penting, agar dalam rangka pemulihan korban bencana alam, intervensi sosial yang diberikan tidak mencabut dari akar budaya dan agama mereka.

Setelah korban bencana dapat diidentifikasi, maka kemudian dilakukan analisis tentang masalah yang dirasakan (*risk analysis*). Beberapa jenis masalah atau resiko yang dirasakan oleh korban dapat dikelompokkan, yaitu : kehilangan harta milik dan sumber penghidupan, menjanda/menduda, anak yatim/piatu dan kecacatan. Permasalahan tersebut ditambah dengan ketelantaran pada lanjut usia.

Berdasarkan analisis korban (*victim analysis*) dan analisis kerugian (*risk analysis*) tersebut, maka selanjutnya disusun analisis kebutuhan pelayanan sosial (*social intervention analysis*). Pelayanan sosial berdasarkan pendekatan pekerjaan sosial

professional bagi korban bencana alam, akan mencapai tujuan optimal apabila dilaksanakan dalam empat fungsi, yaitu :

a. *Pencegahan*

Serangkaian kegiatan yang dilaksanakan untuk mencegah meluasnya kerugian akibat bencana alam. Beberapa kondisi yang perlu dicegah, yaitu terjadinya depresi pada orang dewasa dan anak-anak, perdagangan anak dan wanita, penyalahgunaan anak, serta ketelantaran anak dan lanjut usia. Kemudian memberikan suasana aman, tidak ada kecemasan, kekhawatiran dan ketakutan pada para korban bencana (fungsi perlindungan).

Terkait dengan itu, pelayanan sosial yang diperlukan dalam bentuk bimbingan sosial, yang dilaksanakan dengan pendekatan secara individu, keluarga maupun kelompok sesuai dengan hakikat masalahnya. Petugas utama yang melaksanakan tugas bimbingan sosial ini berasal dari instansi sosial Kabupaten/Kota yang didukung oleh petugas dari instansi sosial propinsi.

Selain bimbingan sosial, pada fungsi pencegahan ini dilaksanakan kegiatan tanggap darurat; yaitu pemberian bantuan kebutuhan pokok, seperti pangan, sandang, tempat tinggal/ penampungan sementara. Tujuannya untuk menyelamatkan dan mengurangi risiko pada korban bencana alam serta meringankan beban hidup mereka.

Untuk mendukung kegiatan ini, petugas di setiap instansi Kabupaten/Kota disamping Taruna Siaga Bencana (TAGANA), Satuan Tugas

Sosial Penanggulangan Bencana (SATGASOS PB), dan tenaga Pos Komando (POSKO) perlu ada Petugas Penyuluh Sosial Lapangan (PPSL) yang tugasnya memberikan bimbingan sosial. Dalam pelaksanaan bimbingan sosial, PPSL ini melibatkan psikolog, rohaniawan, aparat pemerintah setempat dan tokoh masyarakat lokal.

b. *Rehabilitasi Sosial*

Serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk membangun kembali kehidupan masyarakat, sehingga masyarakat tidak kehilangan harapan hidup yang lebih baik setelah kehilangan anggota keluarga, menderita kecacatan dan kehilangan harta benda. Melalui rehabilitasi sosial ini, masyarakat akan memiliki semangat baru untuk menjalani kehidupan selanjutnya yang lebih baik.

Pelayanan sosial yang diperlukan dalam tahap rehabilitasi sosial ini adalah pelayanan konseling atau *terapi traumatic* dan bimbingan sosial, yang dilaksanakan dengan pendekatan secara individu, keluarga maupun kelompok. Di dalam rehabilitasi sosial ini, korban difasilitasi oleh Petugas Penyuluh Sosial Lapangan (PPSL) untuk mulai menata kembali kehidupannya. Seperti jenis pekerjaan, pasangan hidup (bagi janda atau duda), dan keluarga pengganti (bagi anak yatim piatu). Dalam hal ini, PPSL dituntut untuk berperan sebagai fasilitator maupun negosiator untuk :

- 1) Menghubungkan korban (dewasa) dengan lembaga yang menyediakan pelayanan/pelatihan usaha ekonomis produktif.

- 2) Menghubungkan korban (dewasa) dengan lembaga yang menyediakan modal usaha. Atau pemberian stimulan untuk mengembangkan usaha ekonomis produktif.
- 3) Memberikan kesempatan kepada korban (janda dan duda) menikah antar mereka untuk membangun kembali sebuah keluarga.
- 4) Menghubungkan korban (anak) dengan keluarga asli dan atau keluarga pengganti sementara, seperti panti sosial dan orang tua asuh.
- 5) Menyediakan sarana bermain bagi anak-anak/balita.
- 6) Menghubungkan korban (lanjut usia dan penyandang cacat) dengan lembaga pelayanan sosial.

Kegiatan ini dilakukan oleh petugas dari instansi sosial Kabupaten/Kota. Dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial, Petugas Penyuluh Sosial Lapangan (PPSL) ini melibatkan instansi pemerintah sektoral, Orsos/LSM, dunia usaha, aparat pemerintah setempat dan tokoh masyarakat lokal.

c. Pengembangan

Serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat. Korban dimotivasi agar dapat mempertahankan kemajuan yang telah dicapai, dan didorong untuk semakin meningkatkannya menjadi lebih baik.

Pelayanan sosial pada tahap pengembangan ini dalam bentuk pemberdayaan dan advokasi sosial. PPSL diharapkan menjadi fasilitator ataupun mediator untuk tumbuhnya jaringan dan kelembagaan sosial -

ekonomi lokal. Melalui jaringan dan kelembagaan ini, korban akan memperoleh manfaat langsung dalam upaya pemenuhan kebutuhannya. Bentuk jaringan dan kelembagaan sosial ekonomi lokal dimaksud, seperti Rukun Lingkungan, Kelompok Simpan Pinjam, Kelompok Tani dan lain sebagainya.

Kegiatan ini dilakukan oleh PPSL Kabupaten/Kota, yang dalam pelaksanaannya melibatkan instansi pemerintah sektoral, Orsos/LSM, dunia usaha, aparat pemerintah setempat dan tokoh masyarakat lokal.

d. Suportif

Serangkaian kegiatan yang bersifat mendukung kegiatan sektor terkait. Penanganan korban bencana alam di Indonesia secara kelembagaan ditangani secara bersama-sama oleh instansi pemerintah sektoral, baik pada tingkat Kabupaten/Kota (SATLAK PBP), propinsi (BAKORLAK PBP) dan nasional (BAKORNAS PBP). Karena sifatnya mendukung, maka kegiatan yang dilakukan sifatnya kondisional atau sangat tergantung kondisi lapangan. Misalnya, evakuasi korban, penyiapan sarana air bersih, sanitasi lingkungan, penyiapan tempat belajar anak-anak, pusat informasi keluarga dan lain-lain. Untuk melaksanakan fungsi ini, TAGANA berperan sebagai motivator yang mendorong masyarakat untuk melakukan gotong royong dalam penyiapan sarana tersebut. Dalam melaksanakan fungsi ini TAGANA bekerja sama dengan aparat pemerintah setempat dan tokoh masyarakat lokal.

Penerapan dari keempat kegiatan tersebut tidak selalu menggambarkan sistematis kegiatan. Akan tetapi bisa saja dilakukan secara simultan yang disesuaikan dengan kondisi lapangan. Dalam hal ini yang perlu digarisbawahi adalah :

- 1) Bahwa dalam penanggulangan korban bencana, yang menjadi sasaran utama pada instansi sosial adalah pada korban manusianya. Bantuan natura, tempat tinggal sementara, Bahan Bangunan Rumah (BBR) dapat diberikan, akan tetapi bantuan-bantuan tersebut adalah pelayanan yang bersifat pendukung. Sedangkan fokus pelayanan sosial adalah memulihkan kondisi korban bencana alam agar mereka dapat melaksanakan fungsi sosialnya seperti sebelum terjadi bencana alam.
- 2) Korban bencana alam adalah komunitas yang memiliki nilai-nilai, norma sosial, adat istiadat dan kearifan lokal. Aspek ini perlu diperhatikan oleh PPSL maupun tenaga lapangan lainnya (SATGASOS PB, TAGANA dll), agar pelayanan sosial tidak mencabut akar budaya mereka. Sebagai contoh, pada komunitas tertentu, mereka "pamali" (pantang) untuk meminta bantuan orang lain. Hal ini berarti, apabila pelayanan sosial dari luar ini dipaksakan kepada mereka, maka tentu akan merusak tujuan pelayanan sosial itu sendiri. Oleh karena itu, dalam kegiatan pelayanan sosial PPSL dan tenaga lapangan lainnya memposisikan diri sebagai fasilitator. Korban bencana alam diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk membuat pertimbangan-pertimbangan terbaik bagi dirinya.

5. PENUTUP

Bencana alam di Indonesia perlu dipahami sebagai gejala alam yang wajar, karena kondisi geologi, topografi dan geografi Indonesia tidak dapat dilepaskan dari bencana. Sehubungan dengan itu, pemerintah dalam hal ini instansi sosial Pusat, Propinsi dan Kabupaten/Kota dituntut semakin profesional dalam mengelola pelayanan sosial bagi korban bencana alam. Beberapa pelayanan sosial yang perlu disediakan oleh institusi sosial bagi korban bencana, adalah bimbingan sosial, konseling, pemberdayaan dan advokasi sosial. Selain pelayanan sosial itu, juga diberikan bantuan tanggap darurat dan bantuan lain yang sifatnya mendukung kegiatan sektor terkait.

Sehubungan dengan itu, disamping tenaga POSKO, Dapur Umum, SATGASOS PB, TAGANA dan lainnya, diperlukan Petugas Penyuluh Sosial Lapangan. Dengan sumber daya tersebut, maka pelayanan sosial bagi korban bencana alam akan mencapai tujuan secara optimal, yaitu pulihnya keberfungsian sosial korban bencana alam.

PUSTAKA ACUAN

- Anonim, "Kebutuhan Ibu dan Bayi Pengungsi Tak Terpenuhi", *KOMPAS* 6 Januari 2005.
- Anonim "Korban Kebakaran Tidak Boleh Telantar : Mensos Beri Bantuan Rp. 5,2 Milyar", *Media Indonesia* 15 Oktober 2004.
- , "Koordinasi Lemah, Posko Bantuan Mirip dengan Gudang Barang", *Media Indonesia* 4 Januari 2005.

- , "Total Bantuan Untuk Aceh Dapai 914 Milyar", *Media Indonesia* 27 Januari 2005.
- Departemen Sosial RI 2003. *Pola Dasar Pembangunan Kesejahteraan Sosial*. Jakarta; Departemen Sosial RI.
- Departemen Sosial RI 2003. *Pedoman Umum Bantuan Sosial Korban Bencana Alam*. Jakarta; Direktorat Bantuan Sosial Korban Bencana Alam - Direktorat Jenderal Bantuan dan Jaminan Sosial, Jakarta, 2003.
- , *Rekapitulasi Data Kejadian Bencana Periode Bulan*. Jakarta; Direktorat Jenderal Bantuan dan Jaminan Sosial.
- Nugroho, Sumarno T. 1984. *Intervensi Pekerjaan Sosial*. Yogyakarta : Kanisius.
- Pincus, Allan dan Anne Minahan, .1973. *Social Work Praticce : Model and Methode*. Illinois - USA : FE Peacock Phubliser Inc.
- Soetarso. 1980. *Kesejahteraan Sosial, Pelayanan Sosial dan Kebijakan Sosial*. Bandung : KOPMA STKS.
- Siporin, Max. 1975. *Introduction to Social Work Praticce*. New York : Macmillan Phu-bliser Co Inc.
- Thufail, Fadjar I, "Kekerasan, Bencana dan Trauma", *KOMPAS*, 11 Januari 2005.
- Warto (dkk), 2002. *Pengkajian Manajemen Penanggulangan Korban Bencana Pada Masyarakat di Daerah Rawan Bencana Alam dalam Era Otonomi Daerah (Kasus Kabupaten Sukabumi)* Yogyakarta; Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial.

SURADI, Peneliti pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Usaha Kesejahteraan Sosial, Balatbangsos, Depsos RI.